

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN**



DISUSUN OLEH :

YULIA NOVIKA

1800024367

**SKRIPSIINI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023**

A THESIS

***RECHTSPOLIEK OF THE LAW ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES ON
INSTRUMENTS OF WOMEN'S RIGHTS PROTECTION***



BY:

YULIA NOVIKA

1800024367

**PRESENTED AS PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS FOR THE
ATTAINMENT OF SARJANA HUKUM**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN**

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Pembimbing



Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H.

NIP: 197911172003122002

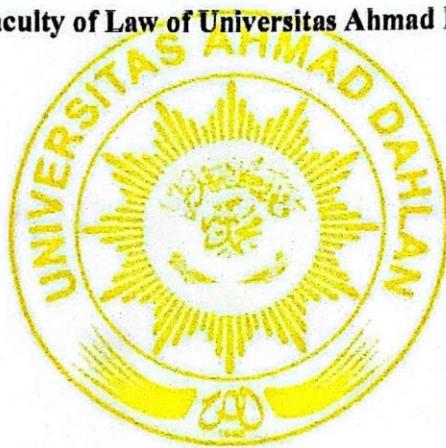
APPROVAL PAGE

POLITICAL LEGAS ACTION OF SEXUAL VIOLENCE IN INTRUMENTS TO PROTECT WOMEN'S HUMAN RIGHTS

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements

To attain the Bachelor Degree of legal studies

at Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Anom Wahyu Asmorojati".

Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H.

NIP: 197911172003122002

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

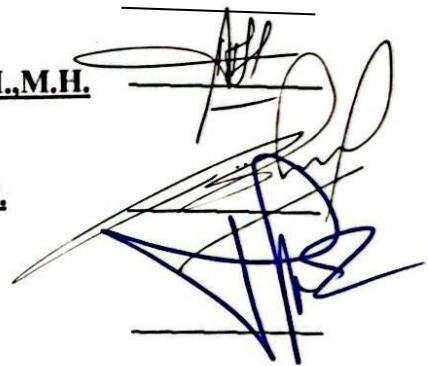
Pada Tanggal: 11 Februari 2023

DEWAN PENGUJI

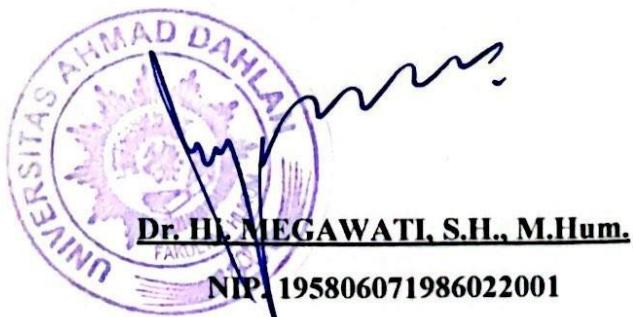
Ketua Penguji : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H.

Anggota Penguji 1 : Rahmat Muhamajir Nugroho, S.H.,M.H.

Anggota Penguji 2 : Mufti Khakim, S.H.,M.H.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



APPROVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR
DEGREE OF LAW

At the Date: February 11, 2023

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H.

Examiner I : Rahmat Muhamid Nugroho, S.H.,M.H.

Examiner II : Musti Khakim, S.H.,M.H.

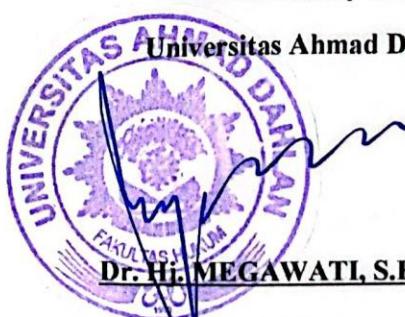


Two handwritten signatures are placed over the seal. One signature is in black ink and the other is in blue ink, both appearing to be names.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. MEGAWATI, S.H., M.Hum.

NIP. 195806071986022001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Novika
NIM : 1800024367
Email : yulia1800024367@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Novika
NIM : 1800029367 Email : yulia1800029367@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan, Perilaku Perlindungan Huk Arosi
Perempuan

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,



Yulia Novika

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Anom Wahyu Astmoyati, S.H., M.H.

Tanda tangan & nama pembimbing

HALAMAN MOTTO

"Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau
yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah."

- Gus Dur

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua serta Keluarga yang bekerja keras, mendukung serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat menempuh pendidikan hingga saat ini.
2. Seluruh Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan, khususnya para Dosen Fakultas Hukum yang banyak mengajarkan Penulis akan banyak hal yang dapat digunakan di kehidupan bermasyarakat nantinya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis sampai pada tahap ini, tak lupa pula shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sebab melalui baginda Nabi, tersampaikannya ajaran islam dengan sempurna sehingga umat manusia bisa keluar dari zaman jahiliyah serta sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“POLITK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN”**

Kekerasan seksual merupakan isu nasional yang sering diperbincangkan saat ini karena tingginya angka kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun yang masih saja mengantui keselamatan dari kaum perempuan. Kekerasan seksual terhadap kaum perempuan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah akhirnya mengesahkan payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang di mana peraturan perundang-undangan ini merupakan undang-undang yang berbasis *Gender*. Pengesahan UU TPKS ini menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi hak-

hak asasi yang dimiliki oleh kaum perempuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai politik hukum UU TPKS terhadap perlindungan hak asasi perempuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, oleh karenanya terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri melainkan juga berkat berbagai bantuan dalam bentuk saran, koreksi maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas;
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau

- pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi;
 6. Ibu Dr. Anom Wahyu Amorojati, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis atas kesediaannya dalam membimbing, memberikan ilmu, saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak Ibu, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu;
 7. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, motivasi dan bimbingan dalam proses akademik perkuliahan;
 8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
 9. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan

- persyaratan yang diperlukan penulis selama ini;
10. Kedua orangtua Penulis yang sangat penulis cintai dan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis, Bapak Martunus dan Ibu Yenti Nora, atas kasih sayang, ridho dan doanya yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun.
 11. Kedua saudara Penulis yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas segala doa-doa, semangat serta kepercayaannya sehingga penulis dapat dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
 12. Seluruh Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis selama berkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
 13. Sahabat seperjuangan Penulis selama berkuliahan di Yogyakarta, yang telah bersama-sama berjuang, membantu, menemani, dan memberikan semangat dalam penggerjaan skripsi ini;
 14. Almamaterku yang ku banggakan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang akan selalu menjadi cerita yang indah untuk diceritakan;
 15. Diri penulis pribadi, terima kasih telah berjuang sejauh ini, berusaha hingga sampai di titik ini, hanya Allah yang tahu suka duka perjuangan penulis selama berkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini;
 16. Serta pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis ucapan terima kasih untuk semangat, dukungan dan bantuan yang tak terhingga.

Semoga segala doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 11 Februari 2023

Yulia Novika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori	20

1. Teori Politik Hukum	20
2. Teori Negara Hukum	24
3. Teori Perlindungan Hukum.....	29
4. Teori Keadilan.....	32
5. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
BAB III POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA	
KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP INSTRUMEN	
PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN	38
A. Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	
Terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan	38
1. Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia	38
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual pada Perempuan	43
3. Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
B. Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan.....	62
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual (UU TPKS)	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Grafik 1: Pola Ktp Tahun 2020 Catahu 2021: Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal (RP), Komunitas dan Negara.

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN**

Yulia Novika

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan yang sering menjadi objek kekerasan seksual. Pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun realitanya, Undang-undang TPKS belum bisa dijadikan rujukan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Politik Hukum UU TPKS terhadap Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *literature research/studi kepublikasi/studi dokumen*. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa politik hukum UU TPKS adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, keadilan, dan memulihkan harkat martabat dan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara efektif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kebijakan Politik Hukum UU TPKS dapat dilaksanakan melalui konsep kebijakan penanggulangan penal dan *nonpenal*. Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS dari segi formal adalah belum adanya aturan turunan dari UU TPKS, sedangkan hambatan dari segi budaya hukum meliputi kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS, masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat serta adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Melalui kebijakan dari Politik Hukum UU TPKS, pemerintah dan masyarakat turut andil dalam perlindungan Hak-hak Asasi Perempuan khususnya pada korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan, Hak Asasi Perempuan*

RECHTSPOLIEK OF THE LAW ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES ON INSTRUMENTS OF WOMEN'S RIGHTS PROTECTION

Yulia Novika

ABSTRACT

Sexual violence violates human rights, especially for women who are often regarded as the object of sexual violence. The ratification of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) is one of the government's efforts to deal with cases of sexual violence and provide protection for victims of sexual violence. However, in reality, the UU TPKS cannot be used as a reference for sexual violence cases that have occurred. This study aimed to find out the Rechtspolitiek of the UU TPKS on the Protection of Women's Rights and to analyze the obstacles in implementing the UU TPKS in Indonesia.

This research was normative juridical research that used statutory and conceptual approaches. The source of data used was secondary data. The data collection method used was literature research/library study/document study. The data obtained from the results of this study would then be analyzed descriptively and qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the *rechtspolitiek* of the UU TPKS were to provide guarantees and legal certainty, justice, and dignity restoration and to provide protection for victims of sexual violence crimes so that cases of sexual violence can be resolved effectively and provide strict sanctions against perpetrators of sexual violence. *Rechtspolitiek* of the TPKS Law could be implemented through the concept of penal and non-penal coping policies. The obstacle in implementing the UU TPKS from a formal perspective was the absence of derivative regulations from the UU TPKS. Meanwhile, obstacles in terms of legal culture included the lack of socialization of the UU TPKS, the strong patriarchal culture that had long developed in people's lives, and the imbalance of power relations. Through the policy of the *rechtspolitiek* of the UU TPKS, the government, and society took part in the protection of Women's Rights, especially for victims of sexual violence.

Keywords: *Rechtspolitiek, Sexual Violence, Protection, Women's Rights*